**JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)**
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Research article

# Asymmetries in Market Structure and Regional Economic Vulnerability in the Agricultural and Fisheries Sectors

# Asimetri Struktur Pasar Dan Kerentanan Ekonomi Wilayah Pada Sektor Pertanian Dan Perikanan

Sovia Dewi*

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pesisir Selatan, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: sovirachel@gmail.com

**Article Information**

***Article history:***

| | | |
|---|---|---|
| Received | : | 26 Januari 2026 |
| Revised | : | 17 Februari 2026 |
| Accepted | : | 30 Maret 2026 |
| Available online | : | 30 April 2026 |

***Keywords:***

*Bargaining power; Market structure; price taker; Rural economy resilience; Regional economic resilience; Small scale producers; Value chain asymmetry*

**Abstract**

*This study examines structural determinants of economic vulnerability in agriculture- and fisheries-based rural economies in Pesisir Selatan Regency, Indonesia. It argues that vulnerability is shaped less by production constraints or environmental risks than by asymmetric value distribution within fragmented value chains. Small-scale farmers and fishers are positioned as price takers because of limited market access, dependence on intermediaries, and weak participation in value-added activities such as processing, distribution, and marketing. These conditions create unequal bargaining relations in which downstream actors control market access, price formation, and information flows, leaving producers exposed to price volatility. Using qualitative policy analysis based on desk study and secondary data, this study applies value chain and market structure perspectives to examine the relationship between market asymmetry, bargaining power, and regional economic resilience. Policy alternatives are evaluated using Dunn's criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility. The study5 compares three options: collective marketing through local economic institutions, downstream processing through rural industrialization, and integration of market information systems. The findings indicate that collective marketing through local economic institutions is the most feasible option because it directly addresses weak producer bargaining power and aligns with existing institutional capacity. Its effectiveness depends on governance quality, institutional accountability, and capacity strengthening. Overall, this study shows that strengthening rural economic institutions is essential for restructuring market relations, improving value distribution, and reducing economic vulnerability. It contributes to rural economic policy analysis by shifting attention from production-centered explanations to structural market relations as a key basis of economic resilience.*

***To cite this article:***
*Dewi, S. (2026). Asimetri Struktur Pasar dan Kerentanan Ekonomi Wilayah pada Sektor Pertanian dan Perikanan. JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 11(1), 137. https://doi.org/10.2577/jakp.11.1.137-157*

© 2026, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under theCC BY-NC-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah dengan karakter ekonomi yang sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian tanaman pangan dan perikanan. Ketergantungan ini membuat struktur ekonomi daerah relatif rentan terhadap fluktuasi eksternal, baik dari sisi harga, kondisi alam, maupun dinamika pasar.

Dalam ekonomi berbasis sumber daya alam, aktivitas produksi tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian eksternal yang sulit dikendalikan oleh pelaku usaha. Di Kabupaten Pesisir Selatan, posisi tawar produsen kecil sangat dipengaruhi oleh struktur pasar yang terfragmentasi, keterbatasan akses terhadap informasi dan jaringan pemasaran, serta ketergantungan pada perantara sebagai agregator hasil produksi. Literatur dalam perspektif *value chain* dan *agrarian political economy* menunjukkan bahwa dalam struktur seperti ini, produsen cenderung berada pada posisi subordinat, sehingga berfungsi sebagai *price taker* dalam mekanisme pasar.

Kondisi ini terlihat jelas pada dominasi sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan utama ekonomi rumah tangga, di mana sekitar 55 persen penduduk bergantung pada sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 36,54 persen(Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2025). Ketergantungan ini menyebabkan guncangan pada produksi maupun harga yang dengan cepat tertransmisikan menjadi perubahan kesejahteraan rumah tangga petani dan nelayan.

Kerentanan tersebut tercermin dalam berbagai indikator empiris. Data menunjukkan peningkatan angka kemiskinan dari 7,11 persen pada 2022 menjadi 7,49 persen pada 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2025a). Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi wilayah masih terbatas dalam merespons tekanan ekonomi. Di sisi lain, pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan menghadapi pendapatan yang tidak stabil meskipun bekerja dalam waktu panjang dan menanggung risiko tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi tidak semata terkait produksi, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi dan mekanisme pasar yang belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha lokal. Pada sektor pertanian, produktivitas padi mengalami fluktuasi dari 5,62 ton/ha (2022) menjadi 4,84 ton/ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024), sementara struktur usaha didominasi petani gurem dengan rata-rata lahan sekitar 0,40 hektare berdasarkan hasil pengolahan Sensus Pertanian 2023 (BPS, 2023a).

Di sektor perikanan, sekitar 71 persen pelaku usaha masih menggunakan alat tangkap sederhana dengan ketergantungan tinggi pada kondisi cuaca (BPS, 2023b) yang mencerminkan keterbatasan kapasitas produksi dan adaptasi ekonomi. Literatur mengenai ketahanan pangan rumah tangga nelayan di wilayah pesisir Indonesia menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan nelayan berdampak langsung pada pola konsumsi, strategi nafkah, dan tingkat kerentanan pangan rumah tangga, terutama di wilayah pesisir dengan pilihan mata

pencaharian yang terbatas (Solihati & Dayanti, 2025).

Kerentanan ketahanan ekonomi wilayah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi berbagai faktor yang saling memperkuat. Keterbatasan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola risiko, akses pasar yang terbatas, serta skala usaha yang kecil menjadi faktor yang membatasi stabilitas pendapatan. Berbagai studi empiris di wilayah pesisir Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan dan petani memiliki tingkat kerentanan pendapatan yang tinggi, terutama pada kelompok usaha skala kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pasar. Studi di Lampung menunjukkan bahwa tekanan eksternal seperti fluktuasi musim dan cuaca dengan cepat tertransmisikan menjadi penurunan pendapatan rumah tangga nelayan(Riantini et al., 2024), yang mencerminkan lemahnya kapasitas adaptasi dalam sistem ekonomi lokal.

Berbagai kondisi tersebut seperti kemiskinan, fluktuasi pendapatan, ketergantungan musim, dan skala usaha kecil pada dasarnya merupakan gejala yang tampak di permukaan. Namun demikian, kerentanan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari mekanisme struktural yang lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan struktur pasar dan posisi tawar pelaku usaha dalam rantai nilai. Dalam konteks ini, keterbatasan akses pasar, ketergantungan pada perantara, serta lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi membentuk relasi yang tidak seimbang dalam proses distribusi nilai, sehingga produsen cenderung berada pada posisi sebagai *price taker*. Namun demikian, penjelasan berbasis faktor produksi dan risiko alam belum sepenuhnya memadai untuk menjelaskan pola kerentanan tersebut secara menyeluruh.

Kerentanan ketahanan ekonomi wilayah tidak hanya dipahami sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas produksi atau risiko alam, tetapi sebagai manifestasi dari mekanisme struktural dalam struktur pasar dan rantai nilai yang membentuk posisi pelaku usaha sebagai *price taker*. Namun, gejala tersebut tidak cukup dijelaskan hanya melalui aspek produksi atau risiko alam. Fluktuasi pendapatan, kemiskinan, dan rendahnya produktivitas lebih tepat dipahami sebagai manifestasi dari struktur ekonomi yang lebih dalam.

Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari keterbatasan produksi menuju struktur pasar dan mekanisme distribusi nilai dalam rantai nilai. Dalam struktur pasar yang terfragmentasi dan didominasi pelaku hilir, produsen skala kecil berada pada posisi *price taker*. Ketergantungan pada perantara, keterbatasan akses informasi harga, serta minimnya akses pasar alternatif membatasi kemampuan mereka dalam mempengaruhi harga jual. Kondisi ini menciptakan bargaining failure, yang pada akhirnya bermuara pada kerentanan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa struktur rantai nilai yang terfragmentasi dan minim integrasi dengan sektor pengolahan, logistik, dan pemasaran menyebabkan produsen skala kecil sulit memperoleh nilai tambah dan tetap berada pada posisi penerima harga (*price taker*)

(World Bank, 2020). Akibatnya porsi keuntungan yang lebih besar justru dinikmati oleh pelaku pengolahan dan perdagangan sementara petani dan nelayan menghadapi keterbatasan ruang untuk meningkatkan pendapatan serta memperkuat posisi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor ekonomi lainnya, yang membuat manfaat ekonomi sulit menyebar secara lebih luas. Literatur mengenai perikanan skala kecil dan rantai nilai pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan keterkaitan antarsektor merupakan persoalan yang bersifat struktural dan banyak ditemukan di berbagai wilayah. Studi tinjauan tentang penghidupan perikanan skala kecil, misalnya, mencatat bahwa struktur pasar yang timpang dan lemahnya linkages ekonomi menyebabkan rumah tangga nelayan tetap berada dalam kondisi rentan meskipun aktif secara ekonomi (Stacey et al., 2021). Temuan-temuan tersebut memperkuat urgensi untuk menelaah lebih jauh permasalahan serupa di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar literatur sebelumnya masih menempatkan kerentanan ekonomi rumah tangga sebagai konsekuensi dari faktor produksi seperti musim, teknologi, dan risiko lingkungan (World Bank, 2020; WRI Indonesia, 2022; Stacey et al., 2021), sehingga belum sepenuhnya menjelaskan peran struktur pasar dan mekanisme distribusi nilai dalam membentuk kerentanan tersebut. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya menggeser fokus analisis dari keterbatasan produksi menuju struktur pasar dan mekanisme distribusi nilai dalam rantai nilai, tetapi juga menegaskan bahwa ketahanan ekonomi wilayah lebih ditentukan oleh struktur distribusi nilai dibandingkan kapasitas produksi semata

Pendekatan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana struktur pasar dan relasi kekuasaan dalam rantai nilai membentuk posisi produsen kecil sebagai penerima harga. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menggeser fokus analisis dari faktor produksi menuju struktur pasar dan relasi distribusi nilai dalam rantai nilai (*value chain*). Kontribusi utama studi ini adalah menjelaskan bagaimana asimetri kekuatan pasar membentuk posisi *price taker* pada produsen skala kecil, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kerentanan ketahanan ekonomi wilayah.

Meskipun penelitian ini mencakup sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan, analisis tidak difokuskan pada perbandingan sektoral, melainkan pada kesamaan karakteristik struktural yang dihadapi oleh produsen skala kecil dalam kedua sektor tersebut. Kedua sektor menunjukkan pola yang serupa dalam hal fragmentasi usaha, keterbatasan akses pasar, serta ketergantungan pada perantara, yang secara bersama-sama membentuk posisi sebagai *price taker* dalam rantai nilai. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada mekanisme struktural yang sama, bukan pada perbedaan teknis antar sektor.

Dalam penelitian ini, posisi tawar tidak hanya dipahami sebagai kemampuan individual dalam bertransaksi, tetapi sebagai posisi relatif produsen dalam struktur rantai nilai, yang menentukan sejauh mana mereka dapat mengakses pasar, mempengaruhi harga, dan memperoleh bagian nilai ekonomi secara adil. Dengan demikian, konsep ini dioperasionalkan

sebagai bargaining power yang terbentuk melalui interaksi antara struktur pasar, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta relasi dengan pelaku hilir seperti pedagang pengumpul dan perantara.

Meskipun berbagai program pembangunan telah meningkatkan kapasitas produksi sektor pertanian dan perikanan, intervensi kebijakan masih cenderung berfokus pada aspek hulu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Irmalasari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk di tingkat daerah masih berorientasi pada pemenuhan input produksi dan belum terintegrasi dengan strategi penguatan pasar dan pemasaran hasil. Sementara itu, penguatan struktur pasar dan tata niaga relatif belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha skala kecil masih bergantung pada mekanisme pasar harian dan perantara dalam menentukan harga jual, sehingga memiliki posisi tawar yang lemah dan terbatas dalam menikmati nilai tambah hasil produksi.

Dari berbagai persoalan tersebut, posisi pelaku usaha yang cenderung berada sebagai *price taker* muncul sebagai masalah paling dominan, akibat terbatasnya akses terhadap pasar dan informasi harga serta ketergantungan yang tinggi pada perantara sebagai jalur pemasaran utama. Dalam kondisi ini, pelaku usaha tidak memiliki ruang tawar dalam menentukan harga jual, sehingga nilai ekonomi hasil produksi lebih banyak berpindah ke pihak lain, sementara pendapatan pelaku usaha tetap rendah dan berfluktuasi. Situasi tersebut melemahkan keberlanjutan pendapatan rumah tangga pelaku usaha melalui keterbatasan dalam mengakses pasar alternatif, ketergantungan pada perantara dalam penentuan harga, serta rendahnya keterlibatan dalam aktivitas bernilai tambah, yang pada akhirnya memperkuat kerentanan ketahanan ekonomi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kerangka analisis rantai nilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi tidak hanya bersumber dari faktor produksi, tetapi dari mekanisme distribusi nilai yang tidak seimbang dalam struktur pasar, di mana pelaku usaha primer memiliki keterbatasan dalam mengakses tahapan yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini mempertegas bahwa posisi sebagai *price taker* bukan sekadar akibat keterbatasan kapasitas individual, tetapi merupakan konsekuensi dari relasi kekuasaan yang asimetris dalam struktur pasar, yang membatasi bargaining power produsen dalam mengakses pasar, mempengaruhi harga, dan memperoleh nilai tambah.

Dalam konteks ini, persoalan utama tidak semata terletak pada kapasitas produksi, tetapi pada struktur pasar dan relasi distribusi nilai yang membentuk posisi pelaku usaha sebagai *price taker*. Posisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki kendali terhadap harga, sehingga peningkatan produksi tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, kerentanan ekonomi wilayah lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar yang tidak seimbang, bukan sekadar keterbatasan produksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diposisikan sebagai analisis kebijakan

(*policy analysis*) dengan pendekatan eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara struktur pasar, posisi tawar pelaku usaha, dan kerentanan ketahanan ekonomi wilayah. Berbeda dengan pendekatan deskriptif, studi ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga mengidentifikasi mekanisme struktural yang membentuknya serta mengevaluasi alternatif kebijakan yang relevan.

Dengan menggunakan kerangka rantai nilai (*value chain*) dan analisis struktur pasar, penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan dalam kajian sebelumnya yang masih berfokus pada aspek produksi, dengan menempatkan posisi tawar pelaku usaha sebagai variabel kunci dalam menjelaskan kerentanan ekonomi wilayah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak diarahkan untuk menggambarkan kondisi sektoral secara umum, melainkan untuk mengidentifikasi pola struktural yang menjelaskan mengapa produsen skala kecil dalam berbagai sektor berbasis sumber daya alam cenderung berada pada posisi tawar yang lemah dalam sistem ekonomi lokal.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kerentanan struktural merujuk pada kondisi di mana kelemahan ekonomi produsen tidak semata disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi, tetapi oleh konfigurasi sistemik dalam struktur pasar, relasi kekuasaan antar pelaku, serta posisi produsen dalam rantai nilai yang membatasi akses terhadap pasar, informasi, dan aktivitas bernilai tambah. Dengan demikian, istilah "struktural" dalam studi ini mencakup keterkaitan antara asimetri kekuatan pasar (*market power asymmetry*), kelemahan kelembagaan ekonomi, dan fragmentasi rantai nilai yang secara bersama-sama membentuk posisi produsen sebagai *price taker*.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada penyajian kondisi empiris daerah, tetapi pada upaya menjelaskan mekanisme struktural yang menghubungkan struktur pasar, posisi produsen sebagai *price taker*, dan kerentanan ekonomi wilayah dalam kerangka analisis kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif analitis yang melampaui pendekatan pembangunan berbasis produksi, dengan menempatkan distribusi nilai dan relasi pasar sebagai faktor kunci dalam memahami ketahanan ekonomi wilayah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggeser fokus analisis dari faktor produksi dan risiko alam menuju mekanisme struktural dalam rantai nilai, khususnya melalui penempatan posisi produsen sebagai *price taker* sebagai variabel kunci dalam menjelaskan kerentanan ketahanan ekonomi wilayah. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung melihat kerentanan sebagai akibat keterbatasan kapasitas produksi, penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan tersebut merupakan hasil dari market structure yang asimetris dan distribusi nilai yang tidak merata. Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan dan pendekatan rantai nilai, studi ini tidak hanya mengidentifikasi akar persoalan struktural, tetapi juga menjelaskan bagaimana relasi pasar membentuk keterbatasan posisi tawar produsen dalam sistem ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis mekanisme pembentukan asimetri kekuatan pasar (*market power asymmetry*) dalam struktur rantai nilai yang menyebabkan produsen skala kecil berada pada posisi *price taker*;

2. Mengeksplanasi hubungan kausal antara struktur pasar, ketimpangan distribusi nilai, dan kerentanan ketahanan ekonomi wilayah, khususnya dalam konteks ekonomi berbasis sumber daya alam;

3. Mengembangkan evaluasi kebijakan berbasis kelembagaan ekonomi lokal yang dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining power) pelaku usaha dalam keterbatasan struktur pasar dan institusi di tingkat lokal.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka analisis kebijakan (*policy analysis*) dengan orientasi eksplanatif. Pendekatan ini digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan kondisi empiris, tetapi untuk menjelaskan mekanisme kausal yang menghubungkan struktur pasar, posisi tawar pelaku usaha, dan kerentanan ketahanan ekonomi wilayah. Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris berbasis data primer, melainkan mengidentifikasi pola dan mekanisme struktural melalui interpretasi sistematis terhadap data sekunder. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan bersifat analitis-eksplanatif untuk memperkuat pemahaman konseptual dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

Metode yang digunakan adalah telaah dokumen (*desk study*) dengan sumber data berupa statistik resmi pemerintah, dokumen perencanaan dan regulasi, serta literatur akademik yang relevan. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis dokumen dan temuan studi terdahulu guna mengidentifikasi pola yang konsisten. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka struktur pasar dan rantai nilai (*value chain analysis*) untuk memetakan distribusi nilai dan relasi antar pelaku dalam sistem ekonomi lokal.

Dalam penelitian ini, posisi tawar dioperasionalkan sebagai bargaining power dalam rantai nilai, yang dianalisis melalui indikator akses pasar, ketergantungan pada perantara, kemampuan menentukan harga, serta keterlibatan dalam tahapan pascapanen dan pemasaran. Indikator tersebut digunakan untuk menilai kekuatan relatif pelaku usaha dalam struktur pasar lokal.

Identifikasi masalah utama dilakukan menggunakan pendekatan *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) sebagai alat bantu penajaman masalah (*problem structuring tool*). Isu-isu diidentifikasi melalui sintesis tematik data sekunder, kemudian dinilai secara kualitatif berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dampak, dan potensi eskalasinya. Penilaian ini

bersifat qualitative judgment berbasis konsistensi bukti antar sumber, sehingga istilah "skoring" digunakan dalam arti peringkat preferensial (ordinal), bukan sebagai pengukuran kuantitatif.

Selanjutnya, evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan mengoperasionalkan kriteria Dunn (2003) melalui pendekatan penilaian komparatif kualitatif. Setiap alternatif dianalisis dalam matriks perbandingan berdasarkan enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan. Penilaian dilakukan secara sistematis melalui sintesis data sekunder dan literatur untuk membandingkan kelebihan serta keterbatasan relatif setiap alternatif dalam menjawab persoalan struktural.

Hasil analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan yang paling feasible dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan fiskal daerah, serta relevansinya dalam memperkuat posisi tawar pelaku usaha. Analisis penelitian difokuskan pada hubungan antara struktur pasar dan akses pasar, posisi pelaku usaha sebagai price taker, serta implikasinya terhadap stabilitas pendapatan dan ketahanan ekonomi wilayah.

Sebagai penelitian berbasis data sekunder, analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji kausalitas secara statistik, melainkan untuk mengidentifikasi pola dan mekanisme struktural yang konsisten. Analisis rantai nilai dalam penelitian ini bersifat konseptual-analitis untuk memetakan relasi antar aktor dan distribusi nilai dalam sistem ekonomi lokal.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Struktur Pasar dan Posisi *Price taker* sebagai Akar Kerentanan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerentanan ketahanan ekonomi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tidak terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat produksi, melainkan oleh struktur pasar yang menempatkan pelaku usaha pertanian tanaman pangan dan perikanan pada posisi sebagai *price taker*. Struktur ini terbentuk dari kombinasi skala usaha kecil, keterbatasan akses pasar, dan dominasi perantara dalam mekanisme distribusi.

Dalam kerangka rantai nilai (*value chain*), produsen terkonsentrasi pada tahap produksi primer dan memiliki keterbatasan akses terhadap aktivitas bernilai tambah seperti pengolahan dan pemasaran. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar nilai ekonomi terkonsentrasi pada pelaku hilir yang menguasai distribusi dan akses pasar.

Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan rata-rata penguasaan lahan petani sekitar 0,40 hektare. Skala usaha yang kecil ini membatasi kapasitas produksi, penyimpanan, dan posisi tawar dalam transaksi, sehingga petani cenderung menjual hasil segera setelah panen untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada perantara

sebagai saluran distribusi utama, yang pada akhirnya membatasi fleksibilitas produsen dalam menentukan waktu dan strategi penjualan.

Mekanisme pembentukan harga dalam kondisi ini tidak berada dalam kendali produsen, melainkan ditentukan oleh pelaku hilir dalam rantai nilai. Dalam banyak kasus, peran pelaku hilir tersebut dijalankan oleh perantara yang menguasai akses pasar, sehingga proses pembentukan harga berlangsung secara asimetris. Kondisi ini mencerminkan rendahnya *bargaining power* produsen karena keterbatasan akses untuk menunda penjualan, memilih pasar alternatif, maupun melakukan negosiasi kolektif.

Dengan keterbatasan tersebut, harga yang diterima produsen bukan hasil interaksi yang setara dalam pasar, melainkan hasil dari struktur relasi yang timpang. Akibatnya, produsen hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*), sehingga fluktuasi harga pasar secara langsung berdampak terhadap pendapatan tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai.

Dominasi perantara diperkuat oleh adanya asimetri informasi, keterbatasan akses pasar alternatif, serta kebutuhan likuiditas cepat pada tingkat produsen. Kondisi ini menciptakan struktur pasar yang cenderung mendekati monopsoni lokal, di mana pembeli memiliki posisi dominan dalam menentukan harga. Dalam situasi ini, ketergantungan pada perantara bukan hanya bersifat fungsional, tetapi juga struktural, karena diperkuat oleh keterbatasan modal kerja dan biaya transaksi yang tinggi jika produsen berusaha menjual langsung ke pasar.

Pola serupa juga terjadi pada sektor perikanan, di mana nelayan skala kecil dengan alat tangkap sederhana menghadapi keterbatasan akses pasar dan posisi tawar kolektif yang lemah. Literatur menunjukkan bahwa struktur pasar yang terfragmentasi dan lemahnya keterkaitan dengan sektor hilir menyebabkan produsen tetap berada pada posisi *price taker* (World Bank, 2020).

Peran dominan perantara dalam rantai distribusi tidak hanya bersifat teknis sebagai penghubung pasar, tetapi juga mencerminkan ketimpangan posisi tawar dalam struktur rantai nilai. Dalam kondisi di mana produsen tidak memiliki akses langsung ke pasar, perantara memiliki posisi strategis dalam menentukan harga, waktu transaksi, dan volume penyerapan.

Relasi ini menunjukkan bahwa *bargaining power* dalam rantai nilai cenderung terpusat pada pelaku perantara, sementara produsen berada pada posisi subordinat. Ketergantungan ini menyebabkan proses transaksi berlangsung dalam kondisi yang tidak seimbang, sehingga produsen memiliki ruang negosiasi yang sangat terbatas dalam menentukan nilai jual komoditasnya.

Kondisi ini sejalan dengan literatur mengenai struktur pasar produsen kecil yang menunjukkan bahwa keterbatasan skala ekonomi dan informasi menyebabkan produsen

tidak memiliki daya tawar dalam pembentukan harga (World Bank, 2020). Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, relasi pasar yang timpang tersebut diperkuat oleh ketergantungan pada perantara sebagai jalur pemasaran utama. Perantara tidak hanya berfungsi sebagai penghubung distribusi, tetapi juga berperan dalam menentukan waktu penjualan dan harga transaksi.

Fluktuasi pendapatan petani dan nelayan tidak hanya dipengaruhi oleh variabilitas produksi atau faktor musim, tetapi juga oleh keterbatasan bargaining power dalam rantai nilai. Rendahnya kemampuan menentukan harga, memilih waktu penjualan, dan mengakses pasar alternatif membuat setiap perubahan harga pasar langsung memengaruhi pendapatan rumah tangga tanpa kemampuan mitigasi risiko ekonomi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa posisi produsen sebagai *price taker* bukan sekadar akibat keterbatasan kapasitas individual, tetapi merupakan hasil dari mekanisme struktural dalam rantai nilai yang membentuk distribusi nilai secara tidak merata. Dalam struktur ini, pelaku hilir memiliki kontrol lebih besar terhadap harga dan akses pasar, sementara produsen primer hanya menerima bagian nilai yang terbatas. Dengan demikian, kerentanan ekonomi wilayah tidak semata disebabkan oleh posisi produsen sebagai *price taker*, tetapi oleh kombinasi antara keterbatasan akses pasar, ketergantungan pada perantara sebagai aktor yang mengontrol akses pasar dan distribusi nilai, dan tidak adanya mekanisme kelembagaan yang mampu memperkuat posisi tawar produsen. Kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk mekanisme struktural yang membatasi kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga, mengakses nilai tambah, dan mengelola risiko pasar, sehingga secara sistematis mentransmisikan fluktuasi pasar menjadi ketidakstabilan pendapatan dan kerentanan ekonomi wilayah. Dengan demikian, kerentanan ekonomi wilayah lebih tepat dipahami sebagai hasil dari asimetri struktur rantai nilai, bukan semata akibat keterbatasan produksi.

### 3.2. Ketergantungan Musim dan Skala Usaha Kecil sebagai Faktor Penguat Kerentanan

Ketergantungan terhadap musim dan risiko alam tetap berperan sebagai faktor penguat kerentanan ekonomi. Fluktuasi produksi pertanian dan ketergantungan nelayan pada kondisi cuaca menunjukkan tingginya volatilitas pendapatan.

Namun demikian, dampak risiko alam tersebut tidak berdiri sendiri. Risiko menjadi problem struktural ketika bertemu dengan keterbatasan kapasitas pasar. Studi Riantini et al. (2024) menunjukkan bahwa fluktuasi musim secara langsung memengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan kecil. Dalam konteks Pesisir Selatan, kondisi tanpa mekanisme penyimpanan, pengolahan, atau pemasaran alternatif, guncangan produksi langsung ditransmisikan menjadi penurunan pendapatan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketahanan ekonomi wilayah berbasis sumber daya alam tidak cukup dijelaskan oleh variabilitas produksi, melainkan oleh kemampuan sistem pasar dalam menyerap dan mendistribusikan risiko tersebut secara lebih adil. Ketika produsen tidak memiliki akses terhadap penyimpanan, pengolahan, atau diversifikasi saluran pemasaran, maka setiap guncangan produksi secara langsung tertransmisikan menjadi penurunan pendapatan.

Skala usaha kecil dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai penyebab langsung kerentanan, melainkan sebagai kondisi struktural yang dapat menjadi problematik apabila tidak didukung oleh kelembagaan kolektif yang mampu mengintegrasikan produksi, memperkuat posisi tawar, dan memperluas akses pasar. Dalam konteks tanpa koperasi yang efektif, kontrak kolektif, atau mekanisme agregasi hasil produksi, skala kecil justru memperkuat posisi fragmentasi pelaku usaha dalam rantai nilai sehingga memperlemah kemampuan dalam merespons risiko produksi dan fluktuasi pasar.

Dengan demikian, musim dan fluktuasi produksi tidak secara langsung menyebabkan kerentanan, tetapi menjadi signifikan ketika berinteraksi dengan struktur pasar yang membatasi akses, distribusi nilai, dan kapasitas produsen dalam mengelola risiko melalui mekanisme rantai nilai.

### 3.3. Rendahnya Nilai Tambah dan Fragmentasi Rantai Nilai

Analisis juga menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi sektor pengolahan dalam struktur ekonomi daerah menjadi indikator lemahnya integrasi rantai nilai. Sebagian besar hasil pertanian dan perikanan dijual dalam bentuk bahan mentah dengan sedikit aktivitas pascapanen atau pengolahan.

Kondisi lemahnya integrasi rantai nilai juga tercermin dari struktur PDRB daerah. Kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 6,64 persen terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur berada di bawah 10 persen. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lokal masih didominasi oleh produksi primer dengan tingkat pengolahan yang minimal. Rendahnya kontribusi sektor pengolahan menjadi indikator terbatasnya penciptaan nilai tambah di tingkat lokal. Akibatnya, sebagian besar surplus ekonomi dari komoditas pertanian dan perikanan tidak terakumulasi di wilayah produksi, melainkan berpindah ke wilayah atau pelaku usaha lain yang menguasai tahapan pengolahan dan distribusi.

Keterbatasan hilirisasi ini memperkuat pola distribusi nilai yang timpang dalam rantai pasok. Tanpa keterlibatan produsen pada tahapan pascapanen dan pengolahan, peningkatan produksi tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, rendahnya kontribusi industri pengolahan bukan sekadar persoalan struktur sektor ekonomi,

tetapi merupakan indikator struktural yang menjelaskan lemahnya posisi tawar produsen dalam sistem ekonomi wilayah.

Dalam laporan *The State of Agricultural Comodity Markets* (SOCO), (FAO, 2020) menegaskan bahwa penciptaan nilai terbesar dalam komoditas pertanian terjadi pada tahapan pascapanen, pengolahan, dan distribusi. Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, keterbatasan akses terhadap tahapan tersebut menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pelaku di luar produsen primer.

Dalam konteks tersebut, ketergantungan terhadap musim tidak dapat dipahami hanya sebagai risiko produksi, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat tekanan likuiditas pada produsen skala kecil. Pada saat musim panen atau musim tangkap yang bersifat terbatas, kebutuhan untuk segera menjual hasil produksi meningkat, terutama karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini mendorong produsen untuk menerima harga yang berlaku di pasar tanpa kemampuan menunda penjualan, sehingga memperlemah posisi tawar mereka dalam struktur rantai nilai. Dengan demikian, musim tidak hanya merepresentasikan variabilitas produksi, tetapi juga berfungsi sebagai faktor yang mempercepat ketergantungan terhadap mekanisme pasar yang tidak seimbang.

Fragmentasi rantai nilai ini menyebabkan distribusi keuntungan yang timpang. Produsen menerima bagian nilai yang relatif kecil, sementara pelaku perdagangan dan pengolahan memperoleh margin lebih besar. Kondisi tersebut memperlemah kemampuan produsen dalam mengakumulasi modal dan meningkatkan kapasitas usaha.

Temuan mengenai fragmentasi rantai nilai tersebut menegaskan bahwa perbaikan posisi tawar produsen memerlukan intervensi yang melampaui peningkatan produksi. Tanpa keterlibatan produsen pada tahapan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, distribusi nilai akan tetap timpang dan tidak berkontribusi pada stabilitas pendapatan. Oleh karena itu, pendekatan rantai nilai (value chain) menjadi kerangka analitis yang relevan untuk menjelaskan perlunya integrasi produksi dengan sistem pemasaran dan pengolahan yang lebih inklusif (OECD-FAO, 2024).

Temuan mengenai fragmentasi rantai nilai tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan posisi tawar produsen tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi pada sisi produksi, tetapi memerlukan perubahan pada struktur distribusi nilai dalam sistem ekonomi lokal. Dalam kerangka tersebut, pendekatan rantai nilai (*value chain*) digunakan sebagai pisau analisis utama dalam merumuskan alternatif solusi. Pendekatan ini memandang aktivitas ekonomi sebagai rangkaian proses yang saling terhubung, di mana peningkatan nilai ekonomi umumnya terjadi pada tahapan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa produsen skala kecil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar ketika memiliki keterlibatan yang lebih kuat pada tahapan tersebut, baik melalui

pengolahan hasil, pemasaran kolektif, maupun kemitraan usaha yang lebih setara (OECD-FAO, 2024).

Dengan demikian, dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, penguatan rantai nilai menjadi kerangka solusi yang relevan. Peningkatan produksi perlu dibarengi dengan kebijakan pasar yang mendorong keterlibatan pelaku usaha pada tahapan pascapanen, pengolahan, pemasaran kolektif, serta pengembangan kemitraan usaha yang lebih setara guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan pendapatan produsen skala kecil.

Secara keseluruhan, fragmentasi rantai nilai dan terbatasnya keterlibatan produsen dalam tahapan bernilai tambah menunjukkan bahwa struktur distribusi nilai dalam ekonomi lokal masih bersifat ekstraktif terhadap produsen primer. Nilai ekonomi cenderung terakumulasi pada pelaku hilir, sementara produsen tetap berada pada posisi dengan margin rendah.

Kondisi ini menegaskan bahwa perbaikan ketahanan ekonomi wilayah tidak dapat dicapai tanpa perubahan pada mekanisme distribusi nilai dalam rantai ekonomi, yang selama ini menjadi faktor utama dalam menentukan posisi tawar dan kesejahteraan produsen.

### 3.4. Kesenjangan antara Arah Kebijakan dan Implementasi Daerah

Secara normatif, kebijakan nasional telah menyediakan kerangka yang mendukung penguatan kelembagaan, hilirisasi, dan perbaikan struktur pasar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menegaskan pentingnya peningkatan posisi tawar produsen kecil dalam sistem pemasaran. Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menempatkan penguatan rantai nilai dan hilirisasi sebagai strategi utama pembangunan nasional.

Secara konseptual, kerangka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan produsen kecil tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan output produksi, tetapi harus disertai transformasi struktur ekonomi melalui penguatan rantai nilai.

Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat daerah masih didominasi pendekatan berbasis produksi, seperti subsidi input, bantuan alat produksi, dan peningkatan kapasitas teknis, sementara intervensi pada aspek pengolahan, pemasaran, dan struktur pasar masih terbatas. Intervensi berbasis produksi tanpa penguatan mekanisme pemasaran dan agregasi kolektif cenderung hanya meningkatkan volume tangkapan tanpa menjamin stabilitas harga dan pendapatan. Intervensi berbasis produksi tanpa penguatan mekanisme pemasaran dan agregasi kolektif cenderung hanya meningkatkan volume tangkapan tanpa menjamin stabilitas harga dan pendapatan (Rahmadani et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya implementation gap antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.

Dalam praktiknya, kondisi ini mencerminkan bahwa struktur produksi di wilayah penelitian

masih terkonsentrasi pada sektor primer tanpa keterhubungan yang kuat dengan aktivitas hilir. Keterbatasan pengolahan dan minimnya integrasi dengan pasar menyebabkan nilai tambah tidak terakumulasi di tingkat produsen, melainkan berpindah ke pelaku yang menguasai tahapan distribusi dan pemasaran. Akibatnya, peningkatan produksi tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan, karena mekanisme distribusi nilai tetap berada pada struktur yang sama.

Kelembagaan ekonomi yang ada seperti kelompok tani, gapoktan, dan koperasi pada dasarnya telah tersedia, namun fungsinya masih terbatas sebagai instrumen administratif dan penyalur program, belum berkembang sebagai aktor ekonomi dalam rantai nilai. Dalam literatur, koperasi berbasis komoditas yang dikelola secara profesional terbukti mampu meningkatkan skala ekonomi, memperkuat kapasitas negosiasi produsen kecil, serta memperbaiki distribusi nilai dalam rantai pasok lokal (Kasyfilham & Akbar, 2025). Namun dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, fungsi tersebut belum berjalan optimal sehingga produsen tetap beroperasi secara individual dalam pasar yang terfragmentasi.

Dalam kondisi tersebut, keterbatasan hilirisasi, lemahnya fungsi kelembagaan, dan dominasi struktur produksi primer secara bersama-sama mempertahankan posisi produsen sebagai *price taker*. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada ketiadaan kelembagaan, tetapi pada belum berfungsinya kelembagaan sebagai instrumen transformasi struktur pasar.

Kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah berkontribusi pada persistensi kerentanan ekonomi wilayah, karena kebijakan belum sepenuhnya diarahkan pada perubahan relasi pasar dan penguatan posisi tawar produsen kecil dalam rantai nilai. Namun demikian, efektivitas arah kebijakan tersebut dalam praktik sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal, kualitas tata kelola, serta kemampuan integrasi dengan mekanisme pasar, sehingga penguatan posisi tawar tidak secara otomatis tercapai tanpa perbaikan fungsi kelembagaan sebagai aktor ekonomi.

### 3.5. Evaluasi Alternatif Kebijakan: Analisis Komparatif

Berdasarkan operasionalisasi kriteria evaluasi Dunn (2003) melalui pendekatan penilaian komparatif kualitatif, tiga alternatif kebijakan dianalisis, yaitu : (1) pemasaran kolektif berbasis kelembagaan, (2) hilirisasi dan pengolahan, serta (3) integrasi informasi pasar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Untuk menjaga konsistensi dan transparansi penilaian, setiap alternatif kebijakan dinilai menggunakan skala tiga tingkat, yaitu tinggi (3), sedang (2), dan rendah (1). Skala tinggi diberikan untuk alternatif yang secara langsung menjawab akar masalah posisi tawar produsen dan feasible secara kelembagaan. Skala sedang diberikan untuk dampak tidak

langsung atau membutuhkan prasyarat tambahan, sedangkan skala rendah menunjukkan keterbatasan dalam menjawab akar persoalan atau hambatan implementasi yang tinggi.

Skema ini digunakan sebagai alat bantu komparatif dalam mengoperasionalkan kriteria evaluasi kebijakan Dunn secara kualitatif, bukan sebagai penghitungan matematis murni, melainkan untuk memperjelas argumentasi dalam menilai dan menentukan alternatif kebijakan yang paling layak. Penilaian terhadap setiap alternatif kebijakan didasarkan pada tingkat kesesuaiannya dengan karakteristik masalah struktural yang telah diidentifikasi sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan struktur pasar, posisi tawar produsen, dan mekanisme distribusi nilai dalam rantai nilai.

**Tabel 1. Matriks Evaluasi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria Dunn**

| Kriteria Evaluasi | Alternatif 1: Pemasaran Kolektif melalui Kelembagaan | Alternatif 2: Hilirisasi dan Pengolahan | Alternatif 3: Integrasi Akses Pasar dan Informasi Harga |
|---|---|---|---|
| Efektivitas | Tinggi – langsung menyasar posisi tawar produsen | Sedang–Tinggi – berdampak pada nilai tambah | Sedang – memperbaiki transparansi harga |
| Efisiensi | Tinggi – memanfaatkan kelembagaan yang ada | Rendah–Sedang – membutuhkan investasi awal | Tinggi – relatif minim biaya operasional |
| Kecukupan | Tinggi – menjawab akar masalah struktur pasar | Sedang – belum menyentuh relasi pasar langsung | Rendah–Sedang – dampak parsial |
| Kesetaraan | Tinggi – memperkuat produsen kecil secara kolektif | Sedang – tergantung akses modal | Sedang – tergantung literasi dan akses informasi |
| Responsivitas | Tinggi – sesuai kebutuhan pelaku usaha skala kecil | Sedang – memerlukan kesiapan usaha | Sedang – meningkatkan pilihan pasar |
| Kelayakan | Tinggi – sesuai kewenangan dan kapasitas daerah | Sedang – tergantung dukungan fiskal | Tinggi – mudah diimplementasikan |

*Sumber : Diolah penulis berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003). Penilaian dalam matriks evaluasi ini didasarkan pada kesesuaian masing-masing alternatif kebijakan dengan karakteristik masalah struktural yang diidentifikasi dalam penelitian, terutama terkait struktur pasar, posisi tawar produsen, dan distribusi nilai dalam rantai pasok.*

Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif pemasaran kolektif melalui kelembagaan ekonomi memiliki kinerja paling konsisten pada hampir seluruh kriteria evaluasi, terutama efektivitas, kecukupan, dan responsivitas. Alternatif ini juga dinilai relatif efisien dan layak karena memanfaatkan kelembagaan yang telah tersedia di tingkat lokal serta secara langsung

menyasar akar masalah posisi tawar produsen.

Sebaliknya, hilirisasi dan pengolahan memiliki potensi peningkatan nilai tambah dalam jangka menengah, namun memerlukan investasi awal yang besar serta kepastian pasar yang lebih kuat. Sementara itu, integrasi informasi pasar dapat meningkatkan transparansi, tetapi dampaknya terbatas apabila tidak disertai penguatan kelembagaan ekonomi produsen.

Secara keseluruhan, penguatan pemasaran kolektif berbasis kelembagaan merupakan strategi paling feasible dalam konteks kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa penguatan fungsi kelembagaan sebagai aktor ekonomi, intervensi pasar akan tetap bersifat parsial dan tidak menyentuh struktur distribusi nilai.

Implementation gap antara desain kebijakan dan praktik di tingkat daerah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknis, tetapi juga oleh orientasi kebijakan yang masih berfokus pada output jangka pendek. Program berbasis bantuan produksi lebih mudah diukur keberhasilannya dibandingkan intervensi struktural seperti penguatan kelembagaan pasar yang membutuhkan waktu lebih panjang. Selain itu, insentif politik dan administratif cenderung mendukung program yang bersifat visible, sehingga reformasi struktur rantai nilai kurang menjadi prioritas. Kelemahan utama bukan pada ketiadaan regulasi atau rendahnya produksi, melainkan pada belum berfungsinya kelembagaan ekonomi sebagai instrumen perubahan struktur pasar.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa akar persoalan tidak hanya pada keterbatasan kapasitas produksi, tetapi pada asimetri dalam struktur rantai nilai yang membatasi distribusi nilai bagi produsen. Penguatan pemasaran kolektif diposisikan sebagai instrumen untuk merekonstruksi relasi pasar dan memperbaiki distribusi nilai dalam rantai ekonomi lokal. Kontribusi utama penelitian ini bukan pada identifikasi alternatif kebijakan, tetapi pada reposisi peran kelembagaan sebagai aktor ekonomi dalam rantai nilai yang berfungsi mengoreksi asimetri pasar dan memperkuat bargaining power produsen kecil.

### 3.6. Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoretis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi wilayah tidak dapat dipahami secara parsial melalui faktor produksi atau risiko alam semata, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari mekanisme struktural dalam distribusi nilai pada rantai ekonomi lokal. Dalam kerangka konseptual, temuan ini merefleksikan bentuk kegagalan pasar (*market failure*) dalam struktur pasar yang terfragmentasi, yang ditandai oleh ketimpangan distribusi nilai dalam rantai pasok (*value chain asymmetry*) serta diperkuat oleh lemahnya peran kelembagaan ekonomi dalam mengoreksi ketimpangan tersebut (*institutional weakness*).

Temuan ini sekaligus memperkuat literatur mengenai pentingnya aksi kolektif dalam

memperbaiki posisi tawar produsen kecil dalam struktur pasar terfragmentasi (Stacey et al., 2021), serta memberikan kontribusi pada diskursus ketahanan ekonomi wilayah dengan menunjukkan bahwa resiliensi tidak hanya ditentukan oleh diversifikasi produksi, tetapi oleh struktur distribusi nilai dalam rantai ekonomi lokal.

Secara kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan *supply oriented* menuju *market structure reform.* Pemerintah daerah perlu berperan sebagai fasilitator perubahan relasi pasar, bukan hanya sebagai penyedia input produksi. Penguatan pemasaran kolektif melalui kelembagaan ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi integrasi rantai nilai yang lebih luas, termasuk hilirisasi dan kemitraan usaha yang lebih setara.

Namun demikian, efektivitas kelembagaan ekonomi tidak bersifat inheren efektif. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelembagaan kolektif seperti koperasi dan kelompok tani dapat mengalami keterbatasan kinerja apabila tidak didukung oleh kapasitas manajerial, tata kelola yang transparan, serta orientasi ekonomi yang kuat. Dalam banyak kasus, kelembagaan tersebut berpotensi bersifat formalitas atau mengalami *elite capture,* sehingga tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen peningkatan posisi tawar produsen. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dalam konteks ini perlu dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas ekonomi dan institusional, bukan sekadar pembentukan struktur organisasi.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi wilayah lebih ditentukan oleh struktur distribusi nilai dalam rantai pasar dibandingkan sekedar kapasitas produksi. Dalam konteks ini, kebijakan publik berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar yang menyebabkan ketimpangan distribusi nilai serta memperkuat posisi tawar produsen kecil dalam sistem ekonomi lokal.

## 4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan ketahanan ekonomi wilayah berbasis pertanian dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terutama disebabkan oleh keterbatasan produksi, tetapi oleh struktur distribusi nilai dalam rantai ekonomi yang bersifat asimetris. Dalam struktur tersebut, produsen skala kecil berada pada posisi *price taker* akibat keterbatasan akses pasar, dominasi perantara, serta lemahnya integrasi dalam aktivitas bernilai tambah.

Posisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pembentukan harga tidak berlangsung dalam kondisi pasar yang setara, melainkan ditentukan oleh aktor hilir yang menguasai akses distribusi dan informasi. Akibatnya, fluktuasi harga pasar langsung ditransmisikan menjadi ketidakstabilan pendapatan tanpa adanya mekanisme penyangga yang memadai di tingkat produsen.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap skala usaha kecil, keterbatasan kelembagaan ekonomi, serta minimnya integrasi rantai nilai memperkuat kerentanan tersebut. Dalam konteks ini, musim dan risiko produksi hanya menjadi faktor penguat, bukan penyebab utama kerentanan ekonomi.

Berdasarkan evaluasi kebijakan, penguatan pemasaran kolektif melalui kelembagaan ekonomi merupakan alternatif paling feasible dalam konteks kapasitas daerah. Namun demikian, efektivitasnya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan tingkat partisipasi anggota. Tanpa penguatan aspek tersebut, kelembagaan berpotensi tidak efektif atau bahkan memperkuat ketimpangan internal melalui dominasi kelompok elit dalam mengendalikan sumber daya dan keputusan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan berbasis telaah dokumen dan data sekunder, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika relasi pasar dan perilaku aktor di tingkat lapangan, serta belum menyediakan validasi empiris langsung berbasis data primer. Selain itu, proses evaluasi alternatif kebijakan masih bersifat kualitatif-komparatif dan belum melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap dampak ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris berbasis data primer, termasuk analisis rantai nilai secara lebih mendalam, evaluasi implementasi kelembagaan ekonomi, serta pengukuran dampak kebijakan terhadap stabilitas pendapatan rumah tangga produsen.

Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa kerentanan ekonomi wilayah merupakan konsekuensi dari asimetri struktur rantai nilai, bukan sekadar keterbatasan produksi. Oleh karena itu, pendekatan produksi-sentris yang selama ini dominan dalam kebijakan dan literatur tidak memadai dalam menjelaskan ketahanan ekonomi wilayah, karena cenderung mengabaikan peran struktur pasar dan mekanisme distribusi nilai. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi wilayah lebih ditentukan oleh struktur distribusi nilai dibandingkan kapasitas produksi semata, sehingga pergeseran kebijakan menuju reformasi struktur pasar menjadi prasyarat utama dalam memperkuat posisi tawar produsen dalam sistem ekonomi lokal.

Selain itu, meskipun penguatan kelembagaan ekonomi diusulkan sebagai alternatif kebijakan, efektivitasnya tidak bersifat otomatis. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang memadai, kelembagaan berpotensi tidak efektif atau bahkan memperkuat ketimpangan internal melalui dominasi kelompok elit, serta menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal.

## 5. Persetujuan Etik

Studi ini menggunakan desain desk study dengan memanfaatkan data sekunder, dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber terbuka yang relevan. Studi ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, tidak melakukan wawancara, observasi partisipatif,

eksperimen, maupun pengumpulan data personal. Atas dasar tersebut, persetujuan etik formal tidak diperlukan dalam studi ini.

**6. Pernyataan Kontribusi Penulis**

Sovia Dewi bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penyusunan artikel, meliputi perumusan gagasan, penyusunan kerangka analisis, pengumpulan dan penelaahan data sekunder, analisis kebijakan, penulisan naskah, revisi, serta persetujuan terhadap versi akhir artikel yang dikirimkan untuk publikasi.7. Pernyataan Penggunaan AI dan Teknologi AI dalam Penulisan

**1. Pernyataan Penggunaan AI dan Teknologi AI dalam Proses Penulisan**

Penulis menggunakan teknologi AI secara terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa, perapian struktur kalimat, dan peningkatan keterbacaan naskah. Penggunaan AI tidak menggantikan proses analisis, interpretasi data, penarikan kesimpulan, maupun tanggung jawab akademik penulis. Seluruh isi, argumen, dan validitas naskah tetap menjadi tanggung jawab penuh penulis**.**

**8. Pernyataan Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan, baik secara finansial, profesional, institusional, maupun personal, yang dapat memengaruhi proses penulisan, analisis, dan kesimpulan dalam artikel ini.

**9. Pendanaan**

Artikel ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga publik, swasta, maupun organisasi nirlaba. Seluruh proses penyusunan artikel dilakukan secara mandiri oleh penulis.

**10. Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan data, dokumen, dan informasi yang relevan bagi penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pengelola jurnal, editor, dan reviewer atas masukan yang membantu perbaikan kualitas naskah.

**11. Ketersediaan Data**

Data yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari data sekunder, dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber terbuka yang relevan. Data pendukung dapat diberikan oleh penulis berdasarkan permintaan yang wajar, sepanjang tidak melanggar ketentuan akses, kerahasiaan, dan hak penggunaan data.

**12. References**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Tabel Statistik Pertanian Tanaman Pangan*. https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table?subject=557%0A

BPS. (2023a). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. In *Sensus Pertanian*.

BPS. (2023b). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 TAHAP II Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Perikanan. In *Sensus Pertanian*.

FAO. (2020). *The State of Agricultural Commodity Markets 2020: Agricultural markets and sustainable development*. https://openknowledge.fao.org/items/a940b7d3-f12a-421e-9703-87387abcd7e7?

Irmalasari, L., Luthfi, M., & Baharuddin, B. (2024). the Implementation of Subsidized Fertilizer Policy at the Department of Horticulture And Plantation Crops in Sinjai District. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *9*(1), 137–150. https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1171871072%0Ahttps://doi.org/10.25077/jakp.9.1.137-150.2024

Kasyfilham, F., & Akbar, N. Al. (2025). Evaluasi Tata Kelola Sampah Yogyakarta Pasca-Piyungan: Studi Komparatif dengan Model Ekonomi Sirkular Banyumas. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *10*(1), 152–181. https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.152-181.2025

OECD-FAO. (2024). OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. In *OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033*. https://doi.org/10.4060/cd0991en

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). *Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkab Pessel Targetkan 15.800 Hektare Musim Tanam 2025*. https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/perkuat-ketahanan-pangan-pemkab-pessel-targetkan-15800-hektare-musim-tanam-2025

Rahmadani, R., Yulivestra, M., & Putri, A. A. (2025). Management of the Pasaman Regency Fisheries and Food Service in Implementing the Aquaculture Village Programme. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *10*(1), 130–151. https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.130-151.2025

Riantini, M., Mardiharini, M., Saptana, Sudjarmoko, B., Kasymir, E., Nur'aini, L. G., Anindita, S. H., Syukur, M., Zulham, A., Wardono, B., Ketut Ardana, I., Indrawanto, C., & Wahyudi, A. (2024). Livelihood Vulnerability Household Fishermen Household Due to Climate Change in Lampung Province, Indonesia. *PLoS ONE*, *19*(12), 1–20. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315051

Solihati, Y., & Dayanti, W. T. (2025). Food Security of Fisher Households in Coastal Areas in Indonesia: a Review. *Journal of Health Science and Pharmacy*, *2*(2), 224–234. https://doi.org/10.36685/jhsp.v2i2.1226

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, *132*, 104654. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654

World Bank. (2020). Indonesia Agro-Value Chain Assessment : Issues and options in promoting digital agriculture. In *Indonesia Agro-Value Chain Assessment*.